

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Suatu negara sangat membutuhkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), dimana pemerintah daerah harus terus melakukan upaya untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah sangat dituntut untuk selalu tertib dan transparan guna untuk mewujudkan tata kelolaan pemerintahan yang baik dan bersih. Upaya dalam mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih, pemerintahan daerah diwajibkan menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Laporan keuangan yang berkualitas adalah laporan yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan pemerintah diatur dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang berupa laporan keuangan.

Laporan keuangan daerah merupakan laporan pertanggungjawaban pemerintah atas kegiatan keuangan pada periode tertentu dan sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh suatu pemerintahan yang dapat dipercayakan serta menunjukan posisi keuangan. Suwarjono (2005) menyatakan bahwa tujuan utama dalam pelaporan keuangan organisasi non bisnis seperti unit-unit

kepemerintahan yaitu untuk menyediakan informasi yang bermanfaat bagi para penyedia dana dan pemakai lainnya, baik berjalan maupun potensial, dalam membuat keputusan-keputusan rasional tentang alokasi dana ke organisasi tersebut. Pemerintahan harus lebih berupaya untuk selalu meningkatkan kualitas laporan keuangan yang banyak, informasi yang dibutuhkan oleh berbagai pihak diluar maupun didalam pemerintahan. Laporan keuangan juga merupakan media bagi sebuah entitas dalam hal ini pemerintahan untuk mempertanggungjawabkan kinerja keuangan kepada publik (Roviyantie, 2010). Pemerintah harus mampu menyajikan laporan keuangan yang berkualitas dan dapat memenuhi karakteristik. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah karakteristik kualitatif laporan keuangan pemerintah antara lain : relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami. Apabila informasi yang terdapat dalam laporan keuangan pemerintah daerah memenuhi kriteria karakteristik kualitatif laporan keuangan pemerintah seperti yang disyaratkan dalam peraturan pemerintahan Nomor 71 Tahun 2010, berarti pemerintah daerah mampu meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah tersebut.

Menurut Yuliani (2010) rendahnya kualitas laporan keuangan dapat disebabkan oleh pemahaman akuntansi dari menyusun laporan keuangan itu sendiri, belum ditetapkannya secara optimal sistem informasi akuntansi keuangan daerah dan atau lemahnya peran internal audit. Berdasarkan Kamus Umum Bahasa Indonesia (2006), seseorang dikatakan paham terhadap akuntansi adalah

mengerti dan pandai bagaimana proses akuntansi itu dilakukan sampai menjadi suatu laporan keuangan dengan berpedoman pada prinsip dan standar penyusunan laporan keuangan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomer 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Meningkat atau menurunnya suatu kualitas laporan keuangan dapat disebabkan oleh pemahaman terhadap komponen dan prinsip laporan keuangan atau pemahaman akuntansi yang kurang. Pemahaman akuntansi harus dimiliki oleh sumber daya manusia yang bekerja di sebuah entitas atau pemerintahan guna untuk menyusun laporan keuangan yang berkualitas.

Penyusunan laporan keuangan yang berkualitas membutuhkan pemahaman yang baik dari sumber daya manusia yang berkompeten dan dapat menerapkan aturan-aturan penyusunan laporan keuangan dengan standar akuntansi pemerintahan (Kiranayanti dan Erawati, 2016). Kompetensi sumber daya manusia adalah kemampuan untuk melaksanakan fungsi-fungsi untuk mencapai tujuannya secara efektif dan secara efisien (Ihsanti, 2014). Menurut Nasruddin (2008) sumber daya manusia merupakan kunci dari keberhasilan suatu instansi atau perusahaan karena sumber daya manusia pada suatu instansi memiliki nilai yang tinggi disebabkan oleh kemampuan, pengetahuan, dan keterampilan. Kompetensi sumber daya manusia memiliki peranan yang sangat penting untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan entitas yang bersangkutan (Wati dkk, 2014). Sumber daya manusia dalam suatu entitas atau pemerintahan juga harus paham dan mampu menerapkan sistem akuntansi

pemerintahan daerah guna untuk menyusun suatu laporan keuangan yang akurat, handal dan dapat dipertanggungjawabkan.

Selain itu dalam suatu penyusunan laporan keuangan juga diperlukan sistem akuntansi keuangan yang sudah berjalan dan digunakan dan digunakan oleh seluruh pihak. Sistem akuntansi keuangan daerah merupakan serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisarkan sampai dengan pelaporan keuangan, dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer (Nordiawan, 2010, h; 201). Sehingga apabila belum memahami sistem akuntansi, berarti belum memahami penyusunan laporan keuangan karena akuntansi pada dasarnya merupakan sistem pengolahan informasi yang menghasilkan keluaran berupa informasi akuntansi atau laporan keuangan (Bastian, 2007, h; 4). Sistem akuntansi pemerintahan daerah yang disusun oleh pemerintah dalam rangka menjamin siklus akuntansi berjalan dengan baik tanpa ada gangguan dan masalah. Apabila ada masalah pada salah satu bagiannya saja dari siklus akuntansi tersebut, bisa berakibat laporan keuangan yang dihasilkan kurang berkualitas (Mahmudi, h; 27). Penyusunan laporan keuangan digunakan untuk mempertanggungjawabkan kondisi keuangan pemerintahan, yang disusun berdasarkan standar akuntansi pemerintahan yang berlaku. Penggunaan standar akuntansi dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintahan dan mewujudkan laporan keuangannya yang relevan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pencatatan transaksi yang tidak akurat bahkan transaksi yang tidak dicatat hingga pencatatan persediaan yang tidak tertib ini merupakan kelemahan-kelemahan dalam suatu sistem pencatatan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah. Hal ini tentu akan menyulitkan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam menyusun laporan keuangan pemerintah daerah yang andal. Hasil Laporan pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) pada laporan keuangan pemerintahan daerah Kabupaten Wonogiri. Kondisi pada tahun 2010 sampai tahun 2014 mendapat Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), kemudian pada tahun 2015 dan 2016 BPK memberi Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Berarti dalam laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Wonogiri pada tahun anggaran 2010 sampai 2014 tidak mengalami peningkatan opini dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK). Sedangkan ditahun 2015 dan tahun 2016, dinyatakan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) bahwa laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Wonogiri dinyatakan opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian).

Kesimpulannya bahwa laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Wonogiri menunjukan kenaikan opini dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2016. hal ini dapat menggambarkan bahwa adanya perbaikan sistem pengelolaan laporan keuangan pemerintah daerah pada tahun 2015 yang mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya yang mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Menurut dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Wonogiri tahun 2016

menyatakan bahwa Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) menilai, minimnya kualitas sumber daya manusia masih menjadi faktor utama yang menjadikan titik lemahnya dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah di Kabupaten Wonogiri.

Adanya keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam memahami akuntansi dan mekanisme penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan menjadi salah satunya kendala dalam mewujudkan Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah (LKPD) yang berkualitas. Pemahaman akuntansi didukung dengan kompetensi sumber daya manusia dan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah, akan meningkatkan sistem pengelolaan laporan keuangan yang disusun oleh suatu entitas. Diharapkan mampu melaksanakan tugas dan fungsi akuntansi dengan sebaik-baiknya dan dapat menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik.

Penelitian yang dilakukan oleh Ihsanti, (2014) menunjukan hasil bahwa kompetensi sumber daya manusia dan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Patra dkk, (2015) dalam penelitiannya menyatakan bahwa penerapan sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Sedangkan penelitian yang diteliti oleh Yuliana dkk, (2010) menunjukan hasil bahwa pemahaman akuntansi, pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah dan peran internal audit berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Berdasarkan fenomena dan penelitian diatas, maka peneliti mengkaji lebih dalam apakah pengaruh kompetensi sumber daya manusia dan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan dengan menambahkan satu variabel yaitu pemahaman akuntansi. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu dengan menambahkan variabel pemahaman akuntansi di dalam penelitian dan tempat penelitian yang di lakukan di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Wonogiri. Selain itu penelitian ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana kualitas laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintahan daerah Kabupaten Wonogiri dan diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat menjadi cerminan untuk mewujudkan laporan keuangan yang berkualitas kedepannya. Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Wonogiri”**

1.2. Perumusan Masalah

1. Bagaimanakah pengaruh pemahaman akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah tahun 2016?
2. Bagaimanakah pengaruh Kompetensi Sumber daya Manusia terhadap kualitas laporan keuangan daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah tahun 2016?

3. Bagaimanakah pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah tahun 2016?
4. Bagaimana Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Kompetensi Sumber Daya Manusia Dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah tahun 2016?

1.3. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pemahaman akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah tahun 2016.
- b. Untuk Mengetahui seberapa besar pengaruhnya Kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah tahun 2016.
- c. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh penerapan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah tahun 2016.

- d. Untuk mengetahui seberapa besar pemahaman akuntansi, kompetensi sumber daya manusia dan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah tahun 2016.

1.3.2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharap dapat memberikan manfaat diantaranya :

a. Bagi Universitas

Diharapkan penelitian ini dapat menambahkan referensi baru untuk universitas khususnya di Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Ponorogo.

b. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Wonogiri

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadikan sebagai bahan pertimbangan dalam memperbaiki kinerja pemerintahan daerah sehingga mampu meningkatkan kinerja pemerintahan daerah khususnya di Kabupaten Wonogiri.

c. Bagi Peneliti

Menambah pengetahuan dan pengalaman dalam meneliti mengenai pemahaman akuntansi, kompetensi sumber daya manusia dan penerapan sistem akuntansi daerah terhadap kualitas laporan keuaangan di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Wonogiri.

d. Bagi Peneliti Selanjutnya

Peneliti berharap hasil dari penelitian ini dapat berguna sebagai literatur untuk menambah pengetahuan bagi peneliti selanjutnya dalam mengembangkan penelitian yang berkaitan dengan tema yang sama.

